

ABSTRAK

Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain atau bisa dikatakan notaris turut serta melakukan tindak kejahatan. Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi pada perbuatan perdata atau pidana terjadi apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain menderita kerugian, yang berarti notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum baik penegakan kode etik, juga penegakan hukum pidana, terhadap notaris yang melakukan tindakan tercela itu. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan kode etik dan pemalsuan, dan dengan menyelidiki semua aturan-aturan yang berkaitan dengan notaris dan pemalsuan. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya penulis menggunakan satu kasus sebagai bahan penelitian yaitu perkara Nomor 676/Pid.B/2016/PN.Smg 2017.

Kesimpulan menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan perbuatan tercela yakni pemalsuan akta melanggar kode etik dikenakan sanksi yaitu pemberhentian sementara. Sementara itu tindakan pemalsuan akta bila terbukti di pengadilan bisa dikenakan Pasal 264 ayat (1).

Kata kunci : Notaris, Pemalsuan, Akta Otentik

ABSTRACT

The involvement of a Notary in a legal case was caused by an error in the deed he made, either because of a notary's own error or the fault of the parties or one of the parties who did not provide the actual information or documents (lack of commitment from the parties or one of the parties) or there is an agreement between the notary and one of the parties that causes harm to the other party or it can be said that the notary participated in committing a crime. The responsibility of the Notary for an authentic deed that is made and indicated in a civil or criminal offense occurs if there is a mistake either intentionally or because of his negligence, causing another person to suffer a loss, which means the notary has committed a violation of the law and can be a reason for the party to suffer a loss fees, compensation and interest to the Notary against an authentic deed containing false information.

This study aims to find out how law enforcement is both the enforcement of a code of ethics, as well as criminal law enforcement, against notaries who carry out such disgraceful actions. Research uses sociological juridical methods using library resources related to codes of ethics and forgery, and by investigating all rules relating to notaries and forgery. To find out how the application is applied, the writer uses one case as the research material, namely case number 676 / Pid.B / 2016 / PN.Smg 2017.

The conclusion shows that a notary who is proven to have committed a disgraceful act, namely the falsification of a deed violating the code of ethics, is subject to sanctions namely temporary termination. Meanwhile the act of falsifying the deed if proven in court can be subject to Article 264 paragraph (1).

Keywords: Notary, Counterfeit, Authentic Deed